

Perkembangan Akuntansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di Kementerian Sosial

**Saridawati¹, Lathifah Dinar², Zahra Nur Azizah³, Anindya Putri Widasari⁴,
Nita Tri Handayani⁵**

¹⁻⁵ Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 39, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

E-mail: [¹saridawati.sti@bsi.ac.id](mailto:saridawati.sti@bsi.ac.id), [²dinarlathifah588@gmail.com](mailto:dinarlathifah588@gmail.com), [³zahrana89@gmail.com](mailto:zahrana89@gmail.com),
[⁴anindya060204@gmail.com](mailto:anindya060204@gmail.com), [⁵nitatri2004@gmail.com](mailto:nitatri2004@gmail.com)

Abstract. *This study analyzes the development of the government accounting system in Indonesia, focusing on the transition from the cash basis to the accrual basis, which began with the implementation of Government Regulation No. 24 of 2005 and was later replaced by Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards (SAP). Through a literature review approach, this Study identifies the development trends and outcomes of applying the accrual basis for accounting in order to improve transparency and accountability in public financial transactions. As a case study, the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (Kemensos) was selected to illustrate the implementation of SAP, including the preparation of the cash-based Budget Realization Report (LRA) as well as other accrual-based financial statements. The results show that accrual-based accounting is an important factor in improving transparency and accountability in government financial reporting.*

Keywords: *accounting development, public sector, financial report.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perkembangan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia, berfokus pada transisi dari basis kas ke basis akrual, yang dimulai dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui pendekatan studi literatur, Studi ini mengidentifikasi tren perkembangan dan hasil penerapan basis akrual untuk akuntansi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan publik. Sebagai studi kasus, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) dipilih untuk menggambarkan implementasi SAP, termasuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas serta laporan keuangan lainnya yang berbasis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Kata kunci: perkembangan akuntansi, sektor publik, laporan keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Akuntansi pemerintahan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan keuangan negara, yang ditujukan untuk mewujudkan sistem keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu perubahan fundamental dalam peraturan ini adalah pergeseran dari sistem akuntansi berbasis kas menuju sistem berbasis akrual, yang telah diimplementasikan secara penuh sejak tahun 2015 melalui PP Nomor 71 Tahun 2010. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis dalam metode pencatatan transaksi keuangan, melainkan merupakan transformasi paradigma dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Istilah basis akrual mengacu

pada metode akuntansi yang melibatkan pencatatan, analisis, dan evaluasi transaksi ekonomi atau transaksi akuntansi pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhitungkan jumlah atau cara pembayarannya (Lina, 2023). Secara sederhana, pendapatan dicatat ketika hak atas pembayaran telah terjadi, dan beban dicatat saat munculnya kewajiban pembayaran, meskipun penerimaan atau pemahaman atas kas yang terkait belum sepenuhnya terjadi. Perkembangan akuntansi ini mampu menyediakan gambaran yang lebih lengkap terkait laporan keuangan publik, sehingga berkontribusi secara signifikan dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menjadi salah satu entitas pemerintahan yang relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi SAP dan basis akrual ini. Kemensos mengelola anggaran yang besar dan mencakup program-program sosial yang sangat kompleks, seperti bantuan sosial tunai, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Kompleksitas ini menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, Kemensos menjadi representasi penting dalam menilai sejauh mana kebijakan akuntansi pemerintahan telah berjalan secara efektif. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang ada kaitannya dengan lembaga-lembaga yang tidak memiliki tujuan mencari laba. Tidak seperti akuntansi komersial yang berorientasi pada laba, akuntansi pemerintahan bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang efisien dan bertanggung jawab. Di Indonesia, disiplin ini mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran negara.

Keberadaan standar akuntansi pemerintahan sangat krusial untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang merefleksikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBN maupun APBD. Menurut (Ariella, 2021), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan aturan baku yang wajib diterapkan oleh instansi pemerintah dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan secara sistematis dan sesuai ketentuan. SAP dirancang untuk menciptakan keseragaman, keterbandingan, serta transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan negara maupun daerah. SAP tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi, tetapi juga menentukan jenis laporan keuangan yang harus disusun, metode pencatatan yang digunakan, serta perlakuan akuntansi terhadap berbagai jenis transaksi dan kejadian ekonomi di lingkungan pemerintahan. Sebelum adanya SAP, sistem akuntansi pemerintahan Indonesia masih menggunakan pendekatan basis kas, yang sangat terbatas dalam memberikan informasi

keuangan yang menyeluruh. Sistem ini hanya mencatat arus masuk dan keluar kas tanpa menggambarkan kewajiban dan hak ekonomi pemerintah. Akibatnya, laporan keuangan menjadi kurang informatif dan tidak mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Basis akrual sebagai pendekatan utama SAP mengharuskan pengakuan transaksi pada saat terjadinya. Perubahan signifikan mulai terjadi pada tahun 2005 dengan diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengadopsi pendekatan *cash towards accrual* sebagai tahap awal menuju basis akrual penuh. Selanjutnya, PP Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan penerapan basis akrual secara menyeluruh paling lambat pada tahun 2015. Penggunaan basis akrual memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih mencerminkan realitas dan memberikan gambaran yang akurat mengenai situasi keuangan entitas pemerintah. Pendapatan diakui saat hak untuk memperolehnya muncul, dan belanja diakui ketika kewajiban untuk membayarnya timbul, tanpa menunggu arus kas aktual.

Akuntansi sektor publik merujuk pada pendekatan pencatatan serta analisis keuangan yang digunakan untuk mengelola dana publik pada institusi pemerintah pusat, lembaga-lembaga negara, pemerintahan daerah, serta masyarakat. Akuntansi sektor publik dalam perkembangannya juga dikenal sebagai akuntansi dana publik, yakni suatu pendekatan dalam pencatatan dan evaluasi keuangan yang diterapkan dalam pengelolaan dana publik. Dana ini umumnya berada di bawah pengawasan institusi sektor publik atau melalui kemitraan antara pihak pemerintah dan sektor swasta.

Sejak awal kemerdekaan, sistem akuntansi pemerintah masih menggunakan pendekatan basis kas dan metode pencatatan tunggal yang terbatas dalam memberikan informasi keuangan yang komprehensif. Perubahan signifikan mulai terjadi pada tahun 2005 dengan diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengadopsi pendekatan *cash towards accrual* sebagai tahap awal menuju basis akrual penuh. Selanjutnya, PP Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan penerapan basis akrual secara menyeluruh paling lambat pada tahun 2015. Basis akrual memberikan gambaran yang lebih realistis dan akurat mengenai kondisi keuangan entitas pemerintah. Pendapatan diakui saat hak untuk memperolehnya muncul, dan belanja diakui ketika kewajiban untuk membayarnya timbul, tanpa menunggu arus kas aktual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Sosial Republik Indonesia, diwajibkan untuk sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun 2015.

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, terutama sejak dimulainya era reformasi. Selain itu, perkembangan globalisasi yang semakin pesat mendorong tiap negara untuk meningkatkan daya saing serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi dinamika global. Dalam konteks ini, akuntansi pemerintahan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam sektor publik, akuntansi berfungsi sebagai suatu sistem yang mencakup kegiatan pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi ekonomi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Proses ini bertujuan utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan, sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sasaran.

Kemajuan teknologi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap praktik akuntansi pemerintahan, terutama dalam hal efisiensi dan kecepatan pelaksanaan proses-proses akuntansi, serta peningkatan validitas informasi yang dihasilkan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah, yang kerap kali kurang efektif. Kondisi ini menyebabkan kegiatan inventarisasi aset tidak dilakukan secara rutin, serta nilai yang tercatat dalam laporan keuangan sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, laporan keuangan berpotensi mengandung informasi yang kurang akurat.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berfungsi sebagai acuan utama bagi entitas pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Ismail, 2024). Tujuan utama SAP adalah menciptakan keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarlembaga, sehingga mendukung evaluasi kinerja keuangan secara objektif dan menyeluruh. SAP berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, lembaga pengawas, dan masyarakat umum. Penerapan SAP bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui sistem pelaporan yang terstandarisasi, yang menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance). Transparansi dalam pelaporan keuangan publik juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Di Indonesia, SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Seiring dengan dinamika kebutuhan informasi keuangan yang semakin kompleks, SAP terus mengalami penyempurnaan. Salah satu penyempurnaan signifikan adalah adopsi basis akuntansi akrual, yang memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai posisi keuangan pemerintah. Melalui akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan arus kas masuk dan keluar, tetapi juga mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Dengan demikian, informasi yang disajikan menjadi lebih lengkap dan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh.

B. Akuntansi Basis Akrual

Akuntansi berbasis akrual merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas (Kusnadi, 2016). Metode ini memungkinkan pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih lengkap dan tepat waktu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi dan kinerja keuangan entitas. Dalam konteks pemerintahan, penerapan akuntansi berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik karena seluruh hak dan kewajiban pemerintah dicatat dan dilaporkan secara komprehensif. Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor pendukung penting dalam implementasinya. Selain itu, akuntansi berbasis akrual juga membantu entitas dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis karena memberikan informasi yang lebih relevan dan andal dibandingkan metode berbasis kas. Implementasi sistem ini di sektor publik, termasuk Kementerian Sosial, menuntut kesiapan teknologi informasi dan pelatihan SDM agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terbaru. Dengan demikian, akuntansi berbasis akrual menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan modern.

C. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara dan daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel. Fungsi utama dari akuntansi sektor publik tidak hanya sebatas pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah (Martadinata, 2024). Melalui sistem akuntansi yang andal, pemerintah dapat menyusun laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan sumber daya publik secara jujur dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan. Akuntansi sektor publik berperan sebagai alat pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut (Karlina, 2023). Keberhasilan pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana akses terhadap layanan tersebut tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara merata. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik menjadi pilar penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (literature review), yang bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan sistem akuntansi pemerintahan, terutama peralihan dari basis kas ke basis akrual. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari berbagai literatur sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, dan laporan resmi yang mengulas kebijakan serta implementasi akuntansi di sektor pemerintahan. Dengan memanfaatkan literatur sekunder yang relevan dan kredibel, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tren perkembangan, serta penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri secara historis perubahan kebijakan akuntansi dan mengevaluasi efektivitas implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai bagaimana sistem akuntansi pemerintah di Indonesia telah berkembang secara bertahap dari pendekatan berbasis kas yang cenderung sederhana dan terbatas dalam penyajian informasi keuangan, menuju sistem berbasis akrual yang lebih kompleks namun memberikan informasi yang lebih akurat, relevan, dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam keuangan publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Akuntansi Pada Sektor Publik

1) Akuntansi Basis Kas

Perkembangan akuntansi pada sektor publik mengalami perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pada tahap awal, akuntansi sektor publik di Indonesia lebih bersifat administratif dan hanya berfokus pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas (cash basis). Sistem akuntansi berbasis kas ini, metode pencatatan keuangannya hanya mengakui transaksi pada saat kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Sistem ini mencatat pendapatan pada saat kas diterima, dan beban saat kas dikeluarkan, tanpa memperhatikan kapan transaksi tersebut terjadi secara ekonomi. Penerapan sistem akuntansi berbasis kas dalam pemerintahan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, khususnya dalam hal penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sistem tersebut yang hanya mencatat transaksi ketika terjadi arus kas, sehingga tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan dan kinerja aktual pemerintah. Output yang dihasilkan sering kali tidak akurat, terlambat, dan kurang informatif karena tidak mencerminkan kewajiban yang belum dibayar atau hak yang belum diterima. Akibatnya, informasi keuangan yang disajikan menjadi kurang relevan dan tidak dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta menghambat upaya perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2) Akuntansi Menuju Akrual

Perhatian terhadap kemajuan akuntansi sektor publik di Indonesia mulai tumbuh pesat setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Regulasi ini menjadi titik awal reformasi dalam tata kelola keuangan nasional karena menekankan pentingnya prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai dasar utama. Melalui aturan tersebut, pemerintah dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang kredibel, disampaikan sesuai jadwal, dan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, untuk memperkuat proses pengambilan keputusan yang lebih optimal dan efisien. Penerapan UU ini

mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan sektor publik, dari yang sebelumnya bersifat administratif menjadi lebih berorientasi pada hasil (result-oriented), serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pada era ini pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan "cash toward accrual" atau basis kas menuju akrual sebagai langkah perantara antara sistem kas murni dan sistem akrual penuh. Masa ini berlangsung sekitar awal tahun 2000-an hingga menjelang diberlakukannya SAP berbasis akrual secara nasional pada tahun 2015. Dalam sistem ini, pengakuan pendapatan dan belanja masih dilakukan berdasarkan arus kas, yaitu saat kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Namun, secara simultan, pemerintah mulai menyusun laporan neraca yang mencatat posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan berbasis kas. Laporan keuangan pun menjadi lebih lengkap dengan dimasukkannya laporan neraca, meskipun laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas. Masa sistem ini memiliki peran penting sebagai jembatan reformasi akuntansi sektor publik, karena di sinilah fondasi teknis, regulatif, dan budaya akuntabilitas mulai dibentuk. Walaupun belum seluruhnya ideal, pendekatan kas menuju akrual memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru, seperti perlunya pelaporan aset secara akurat, pengukuran kewajiban yang relevan, serta pengawasan terhadap efisiensi penggunaan anggaran.

3) Akuntansi Basis Akrual

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dengan pendekatan akrual. Sistem ini mulai diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun anggaran 2015 dan mencakup seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penggunaan akuntansi berbasis akrual memberikan kontribusi besar bagi pemerintah dalam memperkuat keterbukaan serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Berbeda dengan pendekatan berbasis kas, sistem akrual mencatat transaksi secara menyeluruh dan mencerminkan realitas ekonomi pada saat kejadian, bukan hanya ketika terjadi arus kas masuk atau keluar (Dedi, 2024). Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban pemerintah termasuk piutang, utang, serta aset dan liabilitas non-kas lainnya, dapat diidentifikasi dan dicatat secara lebih akurat.

Ini memungkinkan laporan keuangan disusun dengan lebih komprehensif, sehingga lebih akurat dalam menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja pemerintah yang sebenarnya. Informasi yang dihasilkan juga menjadi lebih andal, relevan, dan dapat digunakan secara optimal oleh para pemangku kepentingan, baik dalam proses evaluasi kinerja maupun untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Karena itu, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan fondasi yang penting untuk menciptakan tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

4) Implementasi Sap Di Kementerian Sosial RI

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah mengimplementasikan secara resmi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, struktur, dan prosedur dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pada pelaksanaannya, Kemensos menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan basis kas, yang mengakui pendapatan dan belanja saat kas diterima atau dikeluarkan. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendukung peralihan dari basis kas ke basis akrual, Kemensos telah mengadopsi basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan lainnya, termasuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Langkah ini menunjukkan komitmen Kemensos dalam mendukung reformasi pelaporan keuangan dan sejalan dengan arah kebijakan SAP yang secara bertahap mengintegrasikan pendekatan berbasis akrual dalam sektor publik.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kemensos dirancang untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), guna menjaga konsistensi, integritas, dan kualitas pelaporan keuangan. Ini mencakup pengakuan pendapatan dan belanja berdasarkan basis akrual, di mana pendapatan diakui ketika hak atas pendapatan tersebut timbul dan belanja diakui ketika kewajiban muncul, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, pengelolaan aset dan kewajiban dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan standar yang berlaku, meliputi pencatatan, penilaian, penyusutan, serta

pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan menerapkan SAP secara konsisten dan memanfaatkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kemensos bertekad untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di mata publik serta lembaga pengawas.

Penerapan standar akuntansi di instansi pemerintah seperti Kemensos merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP memberikan acuan serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Sebagai landasan dalam praktik akuntansi sektor publik di Indonesia, penerapan SAP memiliki peran krusial dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mengingat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan merupakan elemen kunci yang harus dipenuhi.

Penerapan SAP telah diatur melalui peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di bidang pelaporan keuangan, audit, serta akuntansi di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Agar SAP benar-benar efektif, maka standar yang digunakan harus dapat diandalkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah menerapkan berbagai strategi, termasuk di antaranya peralihan dari basis kas ke basis akrual. Pengembangan SAP turut merujuk pada *best practices* yang diterapkan secara internasional, namun tetap memperhatikan konteks nasional seperti peraturan yang berlaku, praktik akuntansi domestik, serta kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada. Kementerian sosial telah berupaya menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan baik.

5) KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perubahan sistem akuntansi di Kementerian Sosial, khususnya transisi dari basis kas ke basis akrual, merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga menunjukkan pergeseran paradigma

menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara menyeluruh sejak tahun 2015, laporan keuangan pemerintah kini mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Implementasi SAP di lingkungan Kementerian Sosial, yang didukung oleh sistem aplikasi keuangan seperti SAKTI, telah membawa peningkatan kualitas pelaporan keuangan, baik dari sisi kelengkapan informasi maupun dari segi keandalan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi, Kementerian Sosial menunjukkan progres yang signifikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana terlihat dari perbaikan opini audit BPK dan pengelolaan aset yang semakin tertib.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar Kementerian Sosial terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan sangat penting guna memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten. Selain itu, penguatan sistem informasi keuangan seperti aplikasi SAKTI perlu dioptimalkan, baik dari sisi integrasi data, kemudahan akses, maupun dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selanjutnya, diperlukan pula penguatan koordinasi antarunit kerja dan antarinstansi agar terdapat keseragaman dalam interpretasi dan pelaksanaan standar akuntansi berbasis akrual. Salah satu aspek yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah percepatan proses inventarisasi dan penilaian aset, guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Terakhir, hasil laporan keuangan tidak hanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Ariella Belinda, P., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1).
- Djafar, M. A., Manossoh, H., & Pinatik, S. (2023). Evaluation of accounting systems and procedures direct cash expenditure on research planning agency and Manado regional development during the COVID-19 pandemic. *Jurnal EMBA*, 11(2), 181–189.
- Gilang Ganjar Amrih. (2023). Perkembangan keuangan berstandar akuntansi akrual. *Journal of Economics and Business UBS*, 1, 1323–1336.
- Hafiz, I. A. (2024). Pengaruh standar akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas keuangan daerah melalui pengendalian internal pada OPD Provinsi Banten. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 356–370.
- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, good governance dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 300–306. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.427>
- Khasanah, U., & Nilasari, A. P. (2023). Analisis implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 279–288. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Lina Rosana, & Risma Wira Bharata. (2023). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. *JURNALKU*, 23–34.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620–624. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6>
- Safari, M. D. E. T., Putri, P. A. N., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(5), 3036–3040. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3184>
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1), 24–32. <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Suprianto, A., Alifah, D. E., Subiyakto, M. V., Huda, A., Dewi, T. S., & Program Studi Akuntansi. (2024). Pengembangan akuntansi keuangan pada sektor publik. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 96–103. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Zuliyana, S., Mawaddah, A., & Hartati, R. (2023). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) pada laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 12–33. <https://doi.org/10.1905/sfj.v3i1.8539>